

## Negara Ideal : Menurut Pemikiran Muhammad Natsir dan Soekarno

Utin Dila Mantajai<sup>1</sup>, Selvani<sup>2</sup>, Umu Habibah<sup>3</sup>, Surya Sukti<sup>4</sup>  
Universitas Islam Negeri Palangkaraya<sup>1,2,3,4</sup>

\*Email:

[utindilam@gmail.com](mailto:utindilam@gmail.com), [vanis3194@gmail.com](mailto:vanis3194@gmail.com), [habibahumu093@gmail.com](mailto:habibahumu093@gmail.com)  
[suryasukti@uin-palangkaraya.ac.id](mailto:suryasukti@uin-palangkaraya.ac.id)

### Sejarah Artikel:

Diterima 27-05-2026  
Disetujui 04-06-2026  
Diterbitkan 06-06-2026

### ABSTRACT

*This study examines the concept of an ideal state according to the thoughts of Muhammad Natsir and Soekarno, who have fundamental differences in their views on the relationship between religion and the state. The research problem focuses on how these two figures formulate the concept of an ideal state and what the similarities and differences are. This study uses a qualitative method with a literature review approach, analyzing various sources such as books and academic journals. The results show that Muhammad Natsir views the state as an instrument to implement Islamic values in governance, making religion and state inseparable. In contrast, Soekarno emphasizes the importance of separating religion and state to maintain unity in a diverse society and avoid the politicization of religion. Despite these differences, both thinkers share the same goal: to establish a just, prosperous, and welfare-oriented state. Therefore, the ideas of these two figures provide significant insights into understanding the concept of an ideal state in the Indonesian context.*

**Keywords:** ideal state, Natsir, Soekarno, religion, state

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas konsep negara ideal menurut pemikiran Muhammad Natsir dan Soekarno yang memiliki perbedaan mendasar dalam melihat hubungan antara agama dan negara. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kedua tokoh tersebut merumuskan konsep negara ideal serta apa perbedaan dan persamaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengkaji berbagai sumber seperti buku dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Muhammad Natsir memandang negara sebagai instrumen untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bernegara, sehingga agama dan negara tidak dapat dipisahkan. Sementara itu, Soekarno menekankan pentingnya pemisahan agama dan negara guna menjaga persatuan dalam masyarakat yang majemuk serta menghindari politisasi agama. Meskipun berbeda, kedua pemikiran tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Dengan demikian, pemikiran kedua tokoh ini menjadi kontribusi penting dalam memahami konsep negara ideal dalam konteks Indonesia.

**Kata Kunci:** negara ideal, Natsir, Soekarno, agama, negara

### Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Mantajai, U. D., Selvani, S., Habibah, U. ., & Sukti, S. . (2026). Negara Ideal : Menurut Pemikiran Muhammad Natsir dan Soekarno. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(4), 5118-5123. <https://doi.org/10.63822/md2fgp37>

## **PENDAHULUAN**

Perdebatan mengenai relasi antara Islam dan negara merupakan suatu diskursus yang tak lekang oleh waktu dalam sejarah pemikiran politik Islam di Indonesia. Isu ini menjadi semakin menarik ketika dua tokoh sentral dalam sejarah bangsa, Soekarno dan Mohammad Natsir, memiliki pandangan yang berbeda secara fundamental. Soekarno, dengan latar belakang pemikiran nasionalis dan sekularistiknya, mengadvokasi pemisahan agama dari ranah negara. Sebaliknya, Mohammad Natsir, sebagai seorang intelektual Muslim dan tokoh pergerakan Islam, meyakini bahwa Islam memiliki relevansi fundamental sebagai landasan etika dan moral dalam kehidupan bernegara.

Perbedaan pandangan ini tidak terdapat pandangan yang mengintegrasikan agama kedalam negara berdasarkan pada sebuah keyakinan bahwa negara berfungsi sebagai kendaraan politik untuk menerapkan hukum-hukum Tuhan dalam statusnya sebagai wakil Tuhan. Pandangan ini menjadi acuan kelompok fundamentalis Islam yang cenderung beranggapan bahwa Islam adalah agama total (kaffah), yakni meliputi segala aspek kehidupan, tak terkecuali politik. Al-Maududi berpendapat bahwa tidak dikenal pemisahan agama dan negara sebab Syari'at adalah skema kehidupan yang sempurna dan meliputi tatanan semua aspek kehidupan. (Emi Setyaningsih" 1993)

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait pemikiran Muhammad Natsir dan Soekarno. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari literatur akademik yang membahas konsep negara ideal menurut kedua tokoh tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, membaca, dan menganalisis isi buku serta jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian.

## **HASIL DAN ANALISIS**

### **1. Biografi dan Perjuangan Muhammad Natsir**

Natsir berasal dari Kampung Jembatan Berukir, Alahan Panjang, Propinsi Sumatera Barat yang dilahirkan pada 17 Juli 1908. Ibu bapanya bernama Khadijah dan Idris Sutan Saripadodari pada sebuah keluarga yang sederhana taraf kehidupan mereka. Ayahnya bekerja sebagai „juritulis kontrolir“ semasa pemerintahan Belanda di Alahan Panjang serta di beberapa tempat di Indonesia. Natsir menerima pendidikan yang agak sempurna sejak dari zaman kanak-kanak hinggalah mencapai alam kedewasaan ia itu pendidikan agama dan pendidikan Belanda. Pendidikan awalnya dalam ilmu keagamaan Islam daripada ayahnya dan sekolah agama di tempat kelahirannya iaitu Sekolah Diniyah, Solok yang secara tidak langsung telah memupukannya dengan nilai-nilai agama dan ibadah Islam pada dirinya. Seterusnya, Natsir telah dipersekolahkan di Hollandse Indondse School(HIS). (Mohamad Muzammil Mohamad Noor 2022) Natsir mempunyai tiga saudara kandung, yaitu Yukina, Rubiah, Dan Yohanusun. Di tempat Kelahiran itu dia melewati masa-masa sosialisasi keagamaan dan intelektualnya yang pertama.

Selulus dari HIS M. Natsir masuk MULO di Padang dan aktif mengikuti kegiatankegiatan Ekstrakurikuler, ia masuk anggota pandu Nationale Islami etische Pavin derij, sejenis pramuka Sekarang, Menurut M. Natsir Organisasi merupakan pendidikan pelengkap selain yang didapatkan disekolah kegiatan

organisasi memiliki arti yang besar bagi kesadaran hidup masyarakat. Dari sinilah akan muncul generasi kedepan sebagai pemimpin bangsa. M. Natsir meneruskan pendidikannya ke Algeme Memiddelbare School (AMS) Afdelling A di Bandung. (Ainul Badri, 2020). Pada tahun 1934 ia mempersunting Puti Nur Nahar (lahir di Bukittinggi 28 Mei 1905 dan wafat di Jakarta 22 Juli 1991), seorang guru Taman Kanak-kanak Bersubsidi "Arjuna" Bandung dan juga aktivis JIB.9

Dari perkawinannya, ia dikaruniai putra dan putri yaitu: Siti Muchlisah, Asma Faridah, Hasnah Faizah, Aisyahatul Asriah, Ahmad Fauzi.10 M. Natsir wafat pada tanggal 06

Februari 1993, bertepatan pada tanggal 14 Sya'ban 1413 H di rumah sakit Cipto Mangunkusuma Jakarta dalam usia 85 tahun dan dimakamkan di TPU Karet, Tanah Abang. (Habibi, 2018)

Natsir dikenal sebagai seorang negarawan muslim, ulama, intelektual, tokoh pembaharu dan politisi kenamaan dunia Islam pada abad ke 20 ini. Pada masa perjuangan kemerdekaan ia dipercaya untuk menduduki jabatan-jabatan penting di republik Indonesia seperti Anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP), Menteri Penerangan (1946–1948), anggota DPRS dan Perdana menteri (1950-1951). Kepercayaan itu disebabkan karena kejujurannya dalam perjuangan. Natsir tidak sungkan membentuk kabinet koalisi, melibatkan unsur-unsur non-Muslim dan nasionalis Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia, PSI, dan PIR. Sebagai perdana menteri, Natsir menentang keras pemberontakan Darul Islam. Dia percaya konsep negara Islam merupakan suatu yang ideal, yang tidak bisa diraih melalui kekerasan. Saat yang sama, dia menegaskan, kaum Muslim harus memperjuangkan tata politik yang demokratis. "Sejauh terkait (pilihan) kaum Muslim, demokrasi yang diutamakan karena Islamhanya bisa berkembang dalam sistem yang demokratis. (Emi Setyaningsih, 1993)

## **2. Negara Ideal Menurut Pemikiran Muhammad Natsir**

Mohammad Natsir terjun ke dunia pendidikan dengan tujuan membangun sistem pendidikan yang lebih sesuai dengan ajaran Islam. Hal itu muncul setelah ia melihat akibat dari sistem pendidikan tradisional di dalam pesantren dan madrasah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Mohammad Natsir berpendapat bahwa Pendidikan Islam ditujukan untuk membentuk manusia yang seimbang. Maksud dari seimbang ialah meliputi kecerdasan otak dengan keimanannya kepada Allah dan Rasul. Seimbang ketajaman akal dengan kemahiran tangannya untuk bekerja. Manusia yang percaya akan kekuatannya sendiri akan mampu berdiri sendiri dan tidak akan selalu bergantung pada orang lain untuk makan gaji sebagai pegawai. (Tata, and Nim 2022)

Pada tanggal 3 April 1950 Natsir tampil di podium paripurna Parlemen Republik

Indonesia Serikat. Natsir menyampaikan pidato yang dikenal sebagai Mosi Integral Natsir. Mosi tersebut adalah respon dari pergolakan yang ada di Republik Indonesia Serikat. Resolusi dan demonstrasi di berbagai penjuru negeri menarik perhatian Natsir. Natsir berpikiran bahwa berbagai maksud dari resolusi dan demonstrasi jika dibiarkan dan tanpa arah kemudian akan menjadikan kondisi yang lebih berbahaya bagi keutuhan negara atas hal tersebut maka Natsir ingin membangkitkan rasa persatuan dan kesatuan dari bangsa Indonesia yang pada masa itu juga telah ada riak-riak di berbagai daerah untuk kembali ke persatuan dan kesatuan Indonesia. Perkembangan "gerakan kesatuan" selama tujuh bulan pertama pada 1950 benar-benar mendominasi semua gerakan.

Perkembangan itu dapat dipahami lebih baik dengan cara mempelajari rancangan UUD Federal yang berlaku sejak 27 Desember 1949, hingga sekitar tujuh bulan kemudian sebelum diubah oleh konstitusi kesatuan yang mengatur Republik Indonesia Serikat yang baru. (Motion and Integral 2020)

Bagi Natsir, negara bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan bermoral. bagi Natsir sendiri, Islam dinilai tidak hanya terdiri atas praktek-praktek ibadah an sich, tetapi juga telah memberikan prinsip-prinsip umum yang relevan tentang pengaturan hubungan antara individu dan masyarakat. Menurutnya aturan-aturan yang lebih terinci tentang pengorganisasian sebuah negara diserahkan kepada kemampuan para pemimpinnya untuk melakukan ijtihad. Di samping itu, kehadiran institusi negara dipandang penting karena Islam memerlukan sarana agar berbagai aturannya dapat dijalankan. Jadi, untuk menjaga agar patokan-patokan Islam dapat diberlakukan dan berjalan sebagaimana mestinya. Maka, harus ada suatu power yang dikenal dengan nama "negara". Oleh karena itulah Natsir menegaskan bahwa antara Islam dan negara merupakan dua entitas religio-politik yang menyatu, tidak dapat dipisahkan. (Suyitno, 2015)

### **3. Biografi dan Perjuangan Soekarno**

Ir. Soekarno atau akrab dipanggil Bung Karno lahir di 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur dengan nama kecilnya Kusno Sosrodihardjo dan wafat di 21 Juni 1970 di Jakarta. Bung Karno merupakan anak berasal dari pasangan Raden Soekemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Sebab sakit-sakitan, Soekarno kecil dirawat kakaknya bernama Raden Hardjodikromo bertempat di Tulungagung. Soekarno kembali menetap bersama dengan bapak serta ibunya pada 1909 pada Mojokerto. Saat di Mojokerto itulah oleh ayahnya ditugaskan menjadi kepala Eerste Inlandse School dan Soekarno pun sekolah di tempat itu. Semenjak tinggal kembali bersama orang tuanya, Soekarno mengubah namanya yang berasal Kusno menjadi Soekarno agar dirinya tidak sakit-sakitan lagi dan bisa tumbuh dengan sehat. Sejak kecil Soekarno sudah menjadi anak yang berprestasi bahkan bisa menguasai berbagai bahasa asing. Itulah sebabnya kecerdasan Soekarno dikenal oleh global. (Hafid Ramadhon, 2022)

Marhaenisme adalah sebuah pemikiran intelektual yang lahir dari Soekarno yang mengadaptasikan sosialisme sesuai karakteristik sosial Indonesia. Ideologi marhaenisme kerap kali disamakan dengan sosialisme karena adanya kemiripan perjuangan untuk memperjuangkan masyarakat kelas bawah (wong cilik). Marhaenisme menjadi perjuangan politik nasionalisme kelas di Indonesia dalam mewujudkan keadilan sosial dan perikemanusiaan yang beradab pasca Indonesia merdeka, Nasionalisme yang berkembang di Indonesia melalui Soekarno dan marhaenisme berkembang di masa-masa tumbuh subur praktek industrialisasi dan kapitalisme yang memarjinalkan wong cilik di dalam kegiatan faktor ekonomi dasar. Tatanan semacam ini mengakumulasi tuntutan dari wong cilik selaku obyek tertindas menuntut egalitarianisme yang kemudian disokong kaum nasionalis melalui semangat nasionalisme kelas. Nasionalisme kelas yang ditawarkan menyediakan akses kepada wong cilik transisi menentukan masa depannya dengan adanya sebuah wadah ideologi dan politik yang menjadi modal sosial melawan ketidakadilan. (Anastasia 1999)

### **4. Negara Ideal Menurut Pemikiran Soekarno**

Munculnya gagasan tentang pemisahan agama dan negara dalam pandangan Soekarno setidaknya terdapat tiga hal; Pertama, bahwa pada prinsipnya agama merupakan urusan akhirat (spiritual) yang termasuk dalam ranah pribadi, sedangkan masalah kenegaraan merupakan masalah duniawi yang menyangkut urusan-urusan kemasyarakatan. Pelaksanaan agama menjadi tanggung jawab pribadi, negara dalam hal ini tidak memiliki kewenangan untuk turut campur serta memaksakan ajaran-ajaran agama terhadap warga negara (Kontestasi 2020).

Kedua, Soekarno menilai bahwa tidak ada ijma' ulama yang memang secara khusus menyatakan bahwa agama harus bersatu dengan negara. Pandangannya ini didasarkan pada pemikiran Ali Abdur raziq, yang menolak pandangan mayoritas ulama dan pemikir Muslim mengenai politik Islam. Menurut Abdur raziq, agama dan politik merupakan dua aspek yang berbeda karena syariat Islam dibawa Nabi Muhammad saw. itu hanya mengatur persoalan keagamaan, moral, serta hubungan manusia dengan Tuhan. Berangkat dari pemikiran ini, Soekarno menegaskan perlu secara jelas adanya pemisahan antara agama dan kekuasaan politik. Ia berpendapat bahwa penyatuan antara agama dan negara dapat menimbulkan caesaropapisme, di mana agama dijadikan alat politik oleh penguasa dan berpotensi menjadi sarana penindasan.

Ketiga, Soekarno meyakini tidak ada konsep negara yang secara khusus dibahas dalam Islam. Menurutnya, pemerintahan di Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad saw. bukanlah bentuk negara Islam, sebab Nabi sendiri menyebutnya hanya sebagai umat Islam. Soekarno berpendapat bahwa jika Indonesia dijadikan negara Islam dengan Islam dijadikan sebagai dasar negara, hal tersebut justru akan menimbulkan perpecahan di antara rakyat. Ini dikarenakan Indonesia memiliki keberagaman agama, terutama di wilayah timur yang mayoritas penduduknya bukan pemeluk Islam.

Maka dapat ditarik garis besar bahwasanya pemikiran Soekarno menginginkan adanya kemerdekaan Islam dari segala urusan negara karena ia berpandangan bahwa agama dan negara harus terpisah. Soekarno berpendapat seharusnya agama itu harus dipisahkan dari urusan negara agar tidak dijadikan sebagai alat kekuasaan dan kekuasaan tidak memeralat agama hanya untuk menjalankan suatu negara. (Alkamila. 2025)

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan mengenai pemikiran Muhammad Natsir dan Soekarno tentang negara ideal, dapat disimpulkan bahwa kedua tokoh memiliki perbedaan mendasar dalam memandang hubungan antara agama dan negara. Muhammad Natsir berpendapat bahwa Islam dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, di mana negara berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu, Soekarno memandang bahwa agama dan negara sebaiknya dipisahkan agar tidak terjadi penyalahgunaan agama dalam kekuasaan politik, serta untuk menjaga persatuan bangsa yang majemuk.

Meskipun memiliki perbedaan pandangan, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan negara yang adil, makmur, dan sejahtera bagi seluruh rakyat. Pemikiran Natsir menekankan pentingnya nilai moral dan religius dalam kehidupan bernegara, sedangkan Soekarno menekankan pentingnya persatuan, nasionalisme, dan toleransi dalam masyarakat yang beragam. Oleh karena itu, kedua pemikiran tersebut dapat dipahami sebagai kontribusi penting dalam merumuskan konsep negara ideal yang sesuai dengan kondisi Indonesia.

## **SARAN**

Berdasarkan pembahasan mengenai pemikiran Muhammad Natsir dan Soekarno tentang negara ideal, disarankan agar masyarakat dan para pemangku kebijakan dapat mengambil nilai-nilai positif dari kedua pemikiran tersebut. Nilai keadilan, moralitas, dan religiusitas yang ditekankan oleh Natsir dapat dipadukan dengan semangat persatuan, nasionalisme, dan toleransi yang dikemukakan oleh Soekarno.

Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam dengan menggunakan sumber yang lebih beragam, baik dari buku, jurnal, maupun penelitian terbaru, sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif. Bagi pembaca, diharapkan kajian ini dapat menambah wawasan serta menjadi bahan refleksi dalam memahami konsep negara ideal yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk.

## REFERENSI

- Noor, M. M. M. (2022). Muhammad Natsir: Sumbangannya Terhadap Perjuangan Agama dan Bangsa di Indonesia: Muhammad Natsir: His Contribution Towards Religious and People's Struggle in Indonesia. <https://jml.um.edu.my/index.php/JAT/article/view/26637> .
- Badri, A. (2020). Pemikiran Muhammad Natsir Tentang Agama dan Negara. *Ri'ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/riayah/article/view/2814>
- MOHAMMAD, M. P. K. D. I., & HABIBI, N. U. (2018). Kata Kunci: M. Natsir, Pendidikan, Da'i, Pemikiran. <https://scholar.archive.org/work/dnnqtw2mtjfuzdrjgidd2ht5xq/access/wayback/http://jurnal-stidnatsir.ac.id/index.php/dakwah/article/download/9/8>
- Setyaningsih, E. (2016). Perjuangan Dan Pemikiran Politik Mohammad Natsir (1907-1993) <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/824>
- NATSIR, D. M., & ISLAM, H. T. N. KONSEP NEGARA IDEAL MENURUT ALI ABDUL RAZIQ. <http://digilib.iainlangsa.ac.id/id/eprint/2514>
- Pangestu, D. A., & Sudrajat, A. (2020). Mohammad Natsir: Konsep Hubungan antara Negara dan <https://jurnalfuf.uinsa.ac.id/index.php/JRP/article/view/1415>
- Suyitno, A. (2015). Konsepsi Negara Menurut M. Natsir: Tinjauan Dari Perspektif Pemikiran Politik Islam. *Intizar*, 21(2), 225-246. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar/article/view/309>
- Soekarno, B. I., & Indonesia, B. P. K. Kampus Kimia. [https://www.academia.edu/download/79260058/60MAKALAH\\_ABK\\_I.pdf](https://www.academia.edu/download/79260058/60MAKALAH_ABK_I.pdf)
- Anastasia, M. S., & Sultani, Z. I. M. (2018). Marhaenisme Soekarno sebagai Modal Sosial Perjuangan Politik Nasionalisme Kelas di Indonesia. [https://www.academia.edu/download/86681284/Marhaenisme\\_Soekarno\\_sebagai\\_Modal\\_Sosial\\_Perjuangan\\_Politik\\_Nasionalisme\\_Kelas\\_di\\_Indonesia.pdf](https://www.academia.edu/download/86681284/Marhaenisme_Soekarno_sebagai_Modal_Sosial_Perjuangan_Politik_Nasionalisme_Kelas_di_Indonesia.pdf)
- Alkamila, S. S., Nisa, K., Mandiri, N. C. J., & Sukti, S. (2025). KONSEP NEGARA ISLAM DALAM POLEMIK PEMIKIRAN SOEKARNO DAN MUHAMMAD NATSIR: KAJIAN PEMIKIRAN POLITIK ISLAM. <https://journal.unugiri.ac.id/index.php/almaqashidi/article/view/4386>
- Aminullah, M. S. (2020). Agama dan politik: Studi pemikiran Soekarno tentang relasi agama dan negara. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/SosiologiAgama/article/view/2002>